



**KONFLIK INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DALAM MASALAH
PENGEMBALIAN IRIAN BARAT TAHUN 1949-1962**

SKRIPSI

Oleh :

**Umi Muyasaroh
NIM. 100210302040**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**KONFLIK INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DALAM MASALAH
PENGEMBALIAN IRIAN BARAT TAHUN 1949-1962**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan
Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah
dan untuk mencapai gelar sarjana pendidikan

Oleh :

**Umi Muyasaroh
NIM. 100210302040**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. bapakku Misnan dan ibuku Umi Sulfiati yang tercinta;
2. guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

MOTTO

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (terjemahan Surat *Al-Mujadalah* ayat 11)*)

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan.**)

*) Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-ART (J-ART).

***) Nasution, A.H. 1985. *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama*. Jakarta: Gunung Agung

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Muyasaroh

NIM : 100210302040

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Konflik Indonesia dengan Australia dalam Masalah Pengembalian Irian Barat Tahun 1949-1962" adalah benar-benar hasil karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan skripsi ini belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Maret 2015

Yang menyatakan,

Umi Muyasaroh
NIM 100210302040

SKRIPSI

**KONFLIK INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DALAM MASALAH
PENGEMBALIAN IRIAN BARAT TAHUN 1949-1962**

Oleh

**Umi Muyasaroh
NIM. 100210302040**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sumardi, M.Hum

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Nurul Umamah, M.Pd

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Konflik Indonesia Dengan Australia Dalam Masalah Pengembalian Irian Barat Tahun 1949-1962" telah diuji dan disahkan pada:

Hari :

Tanggal :

Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Tim Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Sumardi, M.Hum
NIP. 19600518 198902 1 001

Dr. Nurul Umamah, M.Pd
NIP. 19690204199303 2 008

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Marjono, M.Hum
NIP. 19600422198802 1 001

Drs. Sumarjono, M.Si
NIP. 19580823198702 1 001

Mengesahkan
Dekan,

Prof. Dr. Sunardi, M.Pd
NIP. 19405011983031 005

RINGKASAN

Konflik Indonesia dengan Australia dalam Masalah Pengembalian Irian Barat Tahun 1949-1962; Umi Muyasaroh; 100210302040; 2015; xiii + 86 Halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia berfluktuasi menurut persepsi atas kepentingan nasional masing-masing pihak dalam periode pemerintahan yang berbeda. Sekitar tahun 1950-an ketika Menzies dari partai liberal mengambil alih pemerintahan Australia, dengan menteri luar negerinya Spender, terjadi perubahan pandangan terhadap Indonesia. Hal ini terkait dengan klaim Indonesia atas wilayah Irian Barat, dianggap sebagai tindakan yang agresif dan ekspansionis. Masalah Irian Barat yang diklaim Indonesia ini kemudian menjadi masalah utama yang mewarnai hubungan Indonesia-Australia sejak tahun 1950-1962.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni (1) bagaimana awal konflik Indonesia-Australia terkait masalah Irian Barat (2) bagaimana tahapan perkembangan konflik Indonesia-Australia terkait masalah Irian Barat (3) bagaimana penyelesaian akhir konflik Indonesia-Australia terkait masalah Irian Barat. Tujuan penelitian ini (1) mengkaji lebih dalam dan menganalisis awal konflik Indonesia-Australia terkait masalah Irian Barat (2) mengkaji lebih dalam dan menganalisis tahapan perkembangan konflik Indonesia-Australia terkait masalah Irian Barat (3) mengkaji lebih dalam dan menganalisis penyelesaian akhir dari konflik Indonesia-Australia terkait masalah Irian Barat. Manfaat penelitian ini untuk (1) Bagi peneliti, memberi pengalaman serta mengasah kemampuan dalam menulis karya tulis ilmiah. (2) Bagi pembaca, dapat menambah khasanah wawasan ilmu pengetahuan sosial khususnya ilmu sejarah yang berkaitan dengan sejarah pengembalian Irian Barat. (3) bagi almamater FKIP Universitas Jember, Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Peneliti

menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan hubungan internasional serta menggunakan teori konflik dan teori kepentingan nasional.

Hasil dari penelitian ini adalah konflik Indonesia-Australia dilatarbelakangi oleh perbedaan kepentingan masing-masing pihak terkait status quo Irian Barat. Konflik Irian Barat ini kemudian memperkeruh hubungan diplomatik kedua negara dari tahun 1950 sampai tahun 1962. Penyelesaian konflik Indonesia-Australia dilakukan dengan negosiasi dan diplomasi serta campur tangan pihak lain yaitu Amerika Serikat. Hubungan Indonesia dan Australia secara umum dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. (1) faktor historis, (2) faktor geografis (3) faktor keamanan. Awal konflik Irian Barat muncul saat pembahasan perjanjian KMB pada tanggal 30 oktober 1949. Pada tahun 1950 Indonesia mengajukan tuntutan atas Irian Barat. Tuntutan Indonesia kemudian mendapat kecaman keras dari pemerintah Australia. Tahapan perkembangan konflik Indonesia-Australia dimulai saat terjadi perundingan Bilateral Indonesia-Belanda pada tahun 1950. Konflik Indonesia Australia kemudian sampai ke ranah internasional (PBB) tahun 1954. Setelah usaha Indonesia untuk mengajukan masalah Irian dalam Sidang Umum PBB gagal, Indonesia melakukan konfrontasi ekonomi dan politik terhadap Belanda yang kemudian mendapat kecaman keras dari Australia. Penyelesaian akhir konflik Irian Barat dimulai saat terjadi perubahan Sikap Amerika Serikat, yang awalnya konservatif menjadi lebih akomodatif terhadap tuntutan Indonesia atas Irian Barat. AS kemudian mendesak Australia untuk memperlunak sikapnya dan menyarankan agar masalah Irian Barat diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Berdasarkan hasil penelitian ini saran yang hendak peneliti kemukakan yaitu, Bagi Pemerintah Republik Indonesia hendaknya lebih memperhatikan wilayah Irian Barat yang telah susah payah diperjuangkan. Bagi pemerintah Australia, supaya lebih menjaga hubungan baik dengan negara tetangga.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konflik Indonesia Dengan Australia Dalam Masalah Pengembalian Irian Barat Tahun 1949-1962”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Sunardi, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Sukidin, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial;
4. Dr. Nurul Umamah, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah;
5. Dr. Sumardi, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Dr. Nurul Umamah, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai;
6. Bapak Drs. Marjono, M.Hum, dan Bapak Drs. Sumarjono M.Si selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini; serta Bapak Drs. Sugiyanto, M.Hum selaku Dosen Wali yang telah membimbing mulai dari awal hingga akhir perkuliahan.
7. Bapak dan ibunda tercinta yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesainya skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, serta seluruh staf di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, atas segala keikhlasan hati membantu penulis selama dalam masa perkuliahan;

9. Adik-adikku: Nur Hanifah (Gentong), Novita Fitriana (Njeppret), Ari Yoga, Ira Dwi, Mbak Dina (Dinol) dan Mas Fuad. Terimakasih atas kasih sayang kalian semua.
10. Semua sahabat-sahabatku: Riska (my partner), Wikandyas, Yusuf, Reny, Warid, Ella, dan Sisil. Terima kasih telah menemani dan memberi semangat untuk terus maju.
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Sejarah angkatan 2010 dan teman-teman Kos Ijo, serta seluruh teman-teman di Jurusan IPS FKIP Universitas Jember, terima kasih atas kebersamaan, persaudaraan dan tempat berbagi suka dan duka;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	Vi
HALAMAN PENGESAHAN	Vii
RINGKASAN	Viii
PRAKATA	Ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan	7
1.6 Manfaat	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	15
3.1 Heuristik	15
3.2 Kritik Sumber	15
3.3 Interpretasi	16
3.4 Historiografi	19
BAB 4. AWAL KONFLIK INDONESIA-AUSTRALIA TERKAIT	21
MASALAH IRIAN BARAT 1949	21
4.1 Latar Belakang Hubungan Indonesia-Australia	21
4.1.1 Faktor Historis	21
4.1.2 Faktor Geografi	23

4.1.3 Faktor Keamanan	25
4.2 Perjanjian KMB Sebagai Awal Mula Konflik Indonesia, Belanda, dan Australia Tahun 1949	26
4.3 Klaim Indonesia Atas Irian Barat dan Reaksi Australia...	30
BAB 5. TAHAPAN PERKEMBANGAN KONFLIK INDONESIA- AUSTRALIA 1950-1959.....	35
5.1 Reaksi Australia atas Perundingan Bilateral Indonesia Belanda 1950	35
5.2 Kebijakan Peti Es Australia 1952-1954	38
5.3 Diplomasi Indonesia di PBB dan Reaksi Australia 1954...	41
5.4 Reaksi Australia atas Kebijakan Konfrontasi Ekonomi dan Politik Indonesia 1956-1959.....	46
BAB 6. PENYELESAIAN KONFLIK INDONESIA –AUSTRALIA TERKAIT MASALAH IRIAN BARAT 1960-1962	51
6.1 Diplomasi TNI dan Perubahan Sikap Australia 1961	51
6.2 Reaksi Australia atas Perjanjian New York	56
6.3 Dampak Penyelesaian Konflik Irian Barat Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Australia 1962-1963	59
BAB 6. PENUTUP	62
7.1 Kesimpulan	62
7.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTARLAMPIRAN.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Matrik Penelitian	67
Lampiran B. Naskah Perjanjian Linggarjati	68
Lampiran C. Naskah Perjanjian Renville.....	75
Lampiran D. Piagam Penyerahan Kedaulatan	82
Lampiran E. Tri Komando Rakyat	83
Lampiran F. Foto Kunjungan Kepala Negara.....	84
Lampiran G. Foto penandatanganan Perjanjian New York.....	85
Lampiran H. Isi Perjanjian New York	86

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara tetangga terpenting bagi Australia selain Papua Nugini (Bramantyo, 1990:27). Begitu pula posisi Australia bagi Indonesia. Arti penting Indonesia bagi Australia bisa dilihat pada beberapa segi yakni, dari segi geografis, geopolitis, geostrategis, serta dari segi historis.

Segi geografis, posisi Australia terletak di antara lautan Hindia dan Pasifik, dengan Antartika di sebelah Selatan, dan kepulauan Asia Tenggara dibagian Barat Lautnya, kedudukan Australia pada posisi yang secara geografis terisolasi. Tetangga terdekat Australia sejak tahun 1949 (sebelum kemerdekaan Papua New Guinea) adalah Indonesia, yang sebelumnya disebut Hindia Belanda (George, 1989:7). Segi geografis Indonesia adalah negara tetangga terpenting bagi Australia karena letak geografisnya yang berdekatan.

Secara geostrategis Australia dikelilingi oleh dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Garis pantai Barat Laut dan Utara Australia membentuk perbatasan terdekat dengan kepulauan Indonesia. Letak Irian Barat dengan pulau-pulau yang berdekatan dengan Australia membentuk atap bagi garis pantai utara Australia. Sisi utara itulah kunci strategis pertahanan Australia (Adil dalam Manggabarani, 2012:57). Indonesia (khususnya wilayah Irian Barat), merupakan benteng dan sekaligus bisa menjadi ancaman bagi Australia (Nusabakti, 1996:35). Jadi, dapat dikatakan bahwa kepulauan Indonesia memiliki arti penting bagi Australia, utamanya letak Irian Barat yang dianggap sebagai *buffer zone* bagi pertahanan Australia. Oleh karena itu, orang-orang Australia sangat menentang klaim Indonesia atas wilayah Irian Barat dan lebih memihak Belanda untuk menduduki wilayah tersebut.

Segi geopolitis, posisi Irian Barat memiliki nilai strategis secara politik dan keamanan, Irian Barat dianggap sebagai mata rantai yang sangat esensial dalam garis pertahanan Australia. Australia akan lebih mudah dalam memberikan

pengaruhnya jika Irian Barat lepas dari NKRI. Sebaliknya jika wilayah itu jatuh ke tangan Indonesia maka Irian Barat akan berubah menjadi pintu masuk yang potensial bagi musuh dari Asia terutama komunisme yang semakin menyebar di wilayah Asia Tenggara (Manggabarani, 2012:57). Secara politik Australia melihat Irian barat sebagai benteng pertahanan (buffer zone) untuk menghadang masuknya pengaruh komunis dan serangan dari arah utara.

Secara historis, menurut Crichtley (1995:26) sejak 1870-an Australia sudah menyadari arti penting wilayah Irian Barat untuk kepentingan strategis pertahanan Australia. Hal ini dapat dilihat dari sikap perdana menteri New South Wales Sir Henry Parkes yang mendesak pemerintah Inggris untuk mengambil alih Kepulauan New Britain, Solomon, New Hibrides, Marshall, Gilbert dan Ellis, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari pemerintah Inggris. Pemerintah Queensland tetap mendesak pemerintah Inggris untuk mengklaim wilayah Irian Timur karena Australia melihat adanya maksud Jerman untuk menguasai wilayah tersebut. Akan tetapi permintaan Queensland ini tidak mendapat tanggapan seperti yang di harapkan. Penolakan pemerintah Inggris ini memaksa Pemerintah Queensland dibawah pimpinan Sir Thomas Mo Ilwraith mengambil inisiatif sendiri untuk menguasai wilayah Irian Timur. Queensland menguasai wilayah ini pada tanggal 4 april 1883. Wilayah Irian Barat terbukti sangat penting bagi pertahanan Australia. Hal ini terbukti lagi pada masa perang dunia II. Bahaya ancaman dari utara kembali menghantui Australia. Jepang berhasil melebarkan usaha ekspansinya sampai hampir ke seluruh wilayah Asia Tenggara. Setelah Jepang menguasai Irian dan berupaya untuk “menembus” daerah Owen Stanley ke Port Moresby, Australia mulai mengirimkan Pasukan untuk menghadang serbuan pasukan Jepang. Arti penting wilayah Irian Barat bagi Australia sudah dirasakan sejak tahun 1870, kemudian semakin terlihat jelas sejak invasi Jepang pada Perang Dunia II yang semakin menguatkan peran Irian Barat sebagai “benteng” bagi Australia terhadap ancaman dari arah utara.

Sesudah perang dunia II berakhir pada tahun 1945, Australia lebih menyadari dirinya sebagai negara yang terletak di Pasifik dan dekat dengan Asia. Letak geografisnya yang dekat dengan Asia, meningkatkan kesadaran akan

pentingnya menjalin hubungan dengan negara-negara Asia khususnya Asia Tenggara (Siboro, 1989:180). Perang dunia II telah memberikan “pelajaran” pada Australia bahwa mereka tidak bisa mengandalkan Inggris untuk menjamin keamanan wilayahnya. Untuk itulah Australia mulai melakukan hubungan diplomatik dengan negara terdekat terutama Indonesia.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia berfluktuasi menurut persepsi atas kepentingan nasional masing-masing pihak dalam periode pemerintahan yang berbeda. Pada saat Konferensi Meja Bundar berlangsung tanggal 23 agustus 1949, masalah status Irian Barat menjadi pokok permasalahan yang cukup penting. Menurut paham delegasi Indonesia, masalah kedaulatan Irian Barat telah tercakup dalam pengertian tentang kesediaan pemerintah Belanda untuk menyerahkan dan mengakui kedaulatan atas seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal pertama Konferensi Meja Bundar yang menyebutkan tentang penyerahan kedaulatan Indonesia dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat tanpa syarat dan tidak dapat dicabut lagi serta RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Delegasi Indonesia mempunyai pendirian yang sama bahwa wilayah Irian Barat tak terpisahkan sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia (Cholil, 1979:2). Persetujuan Linggarjati maupun Renville menetapkan bahwa kedaulatan akan diserahkan atas seluruh wilayah yang dahulunya bernama Hindia Belanda (Bone, 1958:57). Indonesia mengajukan tuntutan atas wilayah Irian Barat berdasarkan Perjanjian Linggarjati, Renville dan perjanjian KMB (Lihat Lampian 2,3,4)

Sekitar tahun 1950-an ketika Menzies dari partai liberal mengambil alih pemerintahan Australia, dengan menteri luar negerinya Spender, terjadi perubahan pandangan terhadap Indonesia. Hal ini terkait dengan klaim Indonesia atas wilayah Irian Barat, dianggap sebagai tindakan yang agresif dan ekspansionis (Umamah, 2000:631). Arthur Calwell, dari oposisi Partai Buruh memperingatkan Australia bahwa jika klaim Indonesia atas Irian Barat ini dibiarkan maka kelak Indonesia juga akan berbuat hal yang sama terhadap Timor Timur, kemudian Papua Nugini dan akhirnya wilayah Australia Utara juga akan jadi incaran Indonesia (Molony dalam Bramantyo, 1990:9). Penolakan Australia terhadap

klaim Indonesia atas wilayah Irian Barat ini dipertegas oleh perjanjian kerjasama antara pihak Australia dan pihak Belanda pada tahun 1957 (Nasution, 1985:82). Ketika terjadi pergantian Menteri Luar Negeri, Australia mengubah pandangannya terhadap Indonesia terkait klaim Indonesia atas Irian Barat yang dianggap sebagai tindakan agresif dan ekspansionis. Untuk mempertegas sikap tersebut, Australia mengadakan perjanjian dengan Belanda untuk menolak klaim Indonesia.

Dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 1957 Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Soebandrio menyatakan dalam pidatonya bahwa Indonesia akan menempuh “jalan lain” yang tidak sampai menimbulkan konfrontasi militer untuk menyelesaikan sengketa Irian dengan Belanda, apabila sidang PBB Ke-12 ini tidak juga berhasil menyetujui resolusi tentang Irian. Karena jalan damai yang ditempuh selama kurang lebih dasawarsa tidak berhasil mengembalikan wilayah Irian, maka Indonesia mulai menempuh konfrontasi ekonomi yang dimulai dengan pengambilalihan perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh dan pemutusan hubungan diplomatik. Dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 1961, masalah Irian Barat kembali menjadi topik perdebatan. Sekretaris Jenderal PBB, U-Thant menganjurkan kepada salah seorang diplomat Amerika Serikat Ellswot Bunker untuk mengajukan usulan penyelesaian masalah Irian Barat kepada kedua belah pihak yang bertikai. Pokok usulan Bunker secara singkat adalah agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Penyerahan itu dilakukan melalui PBB dalam waktu 2 tahun (Notosusanto, 2009:438-439). Usaha diplomasi Indonesia di PBB, mengalami kegagalan sehingga memaksa Indonesia mengambil sikap tegas dengan melakukan konfrontasi ekonomi. Sikap Indonesia ini kemudian mendapat reaksi dari PBB yang kemudian memberikan usulan penyelesaian masalah Irian Barat.

Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda. Amerika Serikat kemudian mendesak Belanda untuk berunding guna mencegah terseretnya Amerika Serikat dan Uni Soviet ke dalam konfrontasi militer di Pasifik. Dengan demikian pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani persetujuan New York

antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda. Australia tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima perjanjian tersebut.

Upaya Indonesia untuk mengembalikan wilayah Irian Barat melalui jalur diplomasi maupun jalur militer serta keinginan Australia yang memiliki kepentingan nasional untuk mempertahankan Irian Barat agar tetap diduduki oleh Belanda sangat menarik untuk diteliti. Terkait bagaimana awal mula konflik Indonesia-Australia dalam masalah Irian Barat, tahapan perkembangan konflik hingga upaya penyelesaian konflik Irian Barat, dan dampak dari selesainya konflik tersebut pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia.

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Penegasan pengertian judul bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya salah pengertian dalam memberikan persepsi terhadap kata-kata ataupun istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Oleh karena itu penulis merasa perlu memberikan batasan pengertian sehingga nantinya ditemukan arah pandang dalam menginterpretasikan arti kata-kata maupun istilah dari judul penelitian.

Menurut Surbakti (1982:149) konflik merupakan “benturan” seperti perbedaan pendapat persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok dan individu atau kelompok dengan pemerintah.

Pengembalian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses atau cara, perbuatan mengembalikan pemulangan, atau pemulihan.

Berdasarkan pengertian diatas, maksud yang terkandung dalam judul “Konflik Indonesia – Australia dalam Masalah Pengembalian Irian Barat tahun 1949-1962” adalah pertentangan antara Indonesia dengan Australia pada saat Indonesia berupaya mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik Indonesia-Australia ini diawali pada tahun 1949. Sehari setelah penyerahan kedaulatan Soekarno menyatakan bahwa setelah penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, perjuangan bangsa

Indonesia selanjutnya adalah mengembalikan Irian Barat kembali ke NKRI. Tuntutan Indonesia atas Irian Barat kemudian mendapat kecaman keras dari pemerintah Koalisi Australia pada Januari 1950.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan agar penelitian ini tidak menyimpang dari fokus permasalahan, maka peneliti perlu membatasi pembahasan khususnya batasan tempat dan waktu. Ruang lingkup waktu atau temporal dalam penelitian ini ialah dari tahun 1949-1962. Tahun 1949 dijadikan batasan awal karena pada tahun tersebut adalah awal dimulainya konflik Irian Barat pada Perjanjian Konferensi Meja Bundar tanggal 23 Agustus 1949-2 November 1949. Dalam perjanjian KMB, konflik Irian Barat tidak mendapat penyelesaian dan akan dibicarakan setahun kemudian. Akan tetapi konflik tersebut ternyata semakin meruncing dengan adanya penolakan dari pihak Belanda untuk mengembalikan Irian Barat. Tuntutan Indonesia atas Irian Barat kemudian mendapat kecaman dari pihak Australia yang akhirnya memperburuk hubungan bilateral Indonesia-Australia. Tahun 1962 dijadikan batasan akhir karena pada tahun 1962 merupakan akhir dari konflik persengketaan wilayah Irian Barat yang ditandai dengan persetujuan New York tanggal 15 Agustus 1962. PBB secara resmi menyerahkan Irian Barat untuk masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ruang lingkup spasial atau tempat penelitian ini adalah Indonesia mengingat fokus utama persengketaan antara Indonesia dan Australia adalah tentang klaim Indonesia atas wilayah Irian Barat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemilihan masalah dan ruang lingkup penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) bagaimana awal mula konflik Indonesia-Australia terkait masalah Irian Barat tahun 1949 ?
- 2) bagaimana tahapan perkembangan konflik Indonesia –Australia terkait masalah Irian Barat tahun 1950-1960 ?

- 3) bagaimana penyelesaian akhir konflik Indonesia-Australia terkait masalah Irian Barat tahun 1960-1962 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang ingin dicapai adalah:

- 1) mengkaji dan menganalisis awal mula konflik Indonesia – Australia terkait masalah Irian Barat.
- 2) mengkaji dan menganalisis tahapan perkembangan konflik Indonesia-Australia terkait masalah Irian Barat.
- 3) mengkaji dan menganalisis penyelesaian akhir dari konflik Indonesia-Australia terkait masalah Irian Barat

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang baik bagi semua kalangan masyarakat, sehingga berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana yang tersaji di atas, maka hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- 1) bagi penulis, memberi pengalaman serta mengasah kemampuan dalam menulis karya tulis ilmiah.
- 2) bagi pembaca, dapat menambah khasanah wawasan ilmu pengetahuan sosial khususnya ilmu sejarah yang berkaitan sejarah pengembalian Irian Barat.
- 3) bagi almamater FKIP Universitas Jember, Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka mengemukakan pendapat para ahli dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu Konflik Indonesia dengan Australia dalam masalah pengembalian Irian Barat tahun 1949-1962, baik yang diterbitkan dalam bentuk buku maupun yang tidak diterbitkan misalnya berupa laporan penelitian dan skripsi. Pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian terdahulu ini digunakan sebagai kerangka berpikir dalam penulisan ini.

Lockwood (1983:277-283) mengulas mengenai dukungan Australia terhadap Indonesia dengan adanya pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda sebagai bentuk dukungan atas perjuangan rakyat Indonesia. Pemerintah yang berkuasa di Australia adalah pemerintah partai buruh di bawah Chifley. Pemerintah Chifley cukup berperan aktif dalam membela kepentingan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka. Hal ini dibuktikan dengan reaksi Australia terhadap dua Agresi Militer yang dilakukan Belanda, dan peran Australia dalam Komisi Tiga Negara. Pada saat Agresi Militer Belanda yang pertama pada bulan Juli 1947 sampai Agresi Militer Belanda yang kedua pada bulan Desember 1948, pemerintah Australia memperlihatkan sikap simpatinya. Pada tanggal 30 Juli 1947 Australia bersama dengan India mengajukan masalah pertikaian Indonesia-Belanda ke sidang Dewan Keamanan PBB. Usaha Australia ini kemudian melancarkan jalan bagi terbentuknya Komisi Tiga Negara. Buku ini hanya membahas mengenai awal hubungan bilateral Australia-Indonesia, dan hanya sedikit yang mencakup masalah Irian.

Critchley (1995:24-28) mengatakan bahwa awal ketertarikan Australia terhadap wilayah Irian Barat sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1870. Australia mulai menyadari arti penting wilayah Irian Barat untuk kepentingan strategis pertahanan, maupun juga dari segi ekonomi. Arti penting wilayah Irian bagi pertahanan Australia terbukti pada saat Perang Dunia II, Ketika Jepang berhasil

melancarkan ekspansinya ke hampir seluruh wilayah Asia Tenggara. Ekspansi Jepang ini kemudian menimbulkan ketakutan tersendiri bagi Australia akan bahaya ancaman yang akan datang dari arah utara. Setelah Perang Dunia II usai, dan Jepang berhasil di usir dari wilayah Indonesia, Australia mendapat ancaman baru yaitu komunisme. Republik China dengan partai komunisnya mulai menyebarkan pengaruh komunisme ke wilayah Asia Tenggara. Kekhawatiran Australia terhadap masuknya pengaruh komunisme ini kemudian semakin membuktikan pentingnya wilayah Irian Barat terhadap ancaman yang berasal dari utara. Dalam penelitian ini, Crithley menekankan pada bahasan mengenai kebijakan apa yang diambil pemerintah Australia terkait konflik Irian Barat.

George (1986:43) memaparkan tentang perkembangan kepentingan diplomatik Australia di bawah pemerintahan partai buruh pimpinan Curtin dan Chifley terhadap Hindia Belanda dan kemudian Indonesia. Pembahasan dalam buku ini dimulai dengan tinjauan singkat atas hubungan Australia dengan Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II. Kemudian ulasan dilanjutkan dengan membahas hubungan Hindia Belanda-Australia pada masa perang Dunia II. Secara umum, fokus utama George adalah menelaah kebijakan Australia terhadap Indonesia selama masa pertikaian Belanda – Indonesia pada tahun 1945-1949. Pada akhir tahun 1949 (setelah perjanjian KMB) Australia tiba-tiba dihadapkan pada satu situasi yang memaksa untuk lebih mengkoordinasikan kebijakan luar negerinya terhadap Indonesia dengan mempertimbangkan kepentingan sendiri di Irian Barat. Dalam penelitian ini Margareth George membahas hubungan Australia – Indonesia periode 1945-1949. Namun, pembahasan mengenai Irian Barat masih dalam porsi yang sangat kecil, yakni pada saat menjelang KMB.

De Geus (2003:53-58) menjelaskan mengenai awal timbulnya masalah Irian Barat yang diawali sejak perjanjian KMB. Bab III menjelaskan mengenai kedudukan Australia serta kepentingan Australia diwilayah Irian Barat. Menteri Luar Negeri Australia, Spender mempunyai gagasan pasti tentang Irian.Ia berpendapat bahwa pulau ini tidak termasuk Indonesia, melainkan Melanesia. Menurut Spender, Irian merupakan mata rantai yang penting dalam pertahanan Australia dan karena alasan keamanan dan strategi, Australia mempunyai

kepentingan yang vital pada masa depan status Irian Barat. Pada Bab VII De Geus menjelaskan mengenai penyelesaian konflik Irian Barat secara mendetail. Akan tetapi fokus kajian dalam penelitian De Geus lebih menekankan pada kepentingan Belanda atas wilayah Irian Barat dari sudut pandang pemerintah Belanda dan kebijakan Pemerintah Belanda dalam menangani konflik Irian Barat.

Nasution (1985: 82-85) yang pernah menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional/KASAD pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno awal tahun 1960 menjelaskan secara detail mengenai upaya diplomasi pemerintah Indonesia untuk menjajaki pendapat Australia mengenai konflik Irian Barat. Kunjungan Nasution ke Australia pada bulan April 1961 untuk menjajaki sikap Australia jika terjadi konfrontasi militer antara Indonesia dengan Belanda. Menzies, Perdana Menteri Australia menegaskan bahwa Australia tetap mengakui kedaulatan Belanda di Irian Barat. Bahkan Australia turut menghadiri “peresmian” Papuanisasi yang dilakukan oleh Belanda. Program papuanisasi menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Presiden Soekarno mengutus Jenderal Nasution untuk meminta bantuan militer pada Uni Sovyet. Tindakan Indonesia tersebut kemudian memaksa Amerika Serikat untuk mendesak Belanda agar bersedia berunding dengan Indonesia mengenai penyelesaian masalah Irian Barat. Dalam Penelitian ini Nasution lebih menfokuskan pada penyelesaian akhir konflik Irian Barat dan Peran militer dan PBB dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Cholil (1979:25-29) mengungkapkan semenjak diajukannya gagasan Belanda pada tahun 1961 untuk melakukan dekolonisasi dan internasionalisasi Irian Barat dalam forum PBB tanpa mengajak serta Indonesia untuk merundingkannya terlebih dahulu, menyebabkan ketegangan makin meningkat. Rencana pembentukan Negara Papua telah menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia. Tuntutan Indonesia untuk menyatukan wilayah tanah airnya tertuang dalam Tri Program Kabinet Kerja tahun 1960. Sikap Belanda yang tetap bersikeras untuk tetap mempertahankan wilayah Irian Barat, membuat Kepala Staf Angkatan Darat memberitahukan kepada Gabungan Kepala Staf (GKS) bahwa Presiden Republik Indonesia telah memerintahkan GKS untuk menyusun rencana Operasi Gabungan guna pembebasan Irian Barat. Dengan demikian jelaslah

bahwa pada saat dikumandangkannya Trikora pada tanggal 19 Desember 1961 telah ada suatu kepastian mengenai tindakan-tindakan yang diambil dalam rangka pembebasan Irian Barat dengan jalan konfrontasi. Dalam pembahasan Cholil juga mendeskripsikan lebih jelas mengenai Operasi Gabungan yang dilakukan Indonesia seperti Operasi Infiltrasi dan Operasi Jaya Wijaya dibahas secara lebih mendetail.

Siboro (1989:179-186) menjabarkan tentang perkembangan politik luar negeri Australia pada masa sebelum berlangsungnya Perang Dunia I hingga masa sesudah Perang Dunia II. Terjadi perkembangan sikap Australia terhadap Indonesia. Pada periode 1946-1949, terlihat perubahan sikap Australia, dari memihak Belanda kemudian bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Masalah Irian Barat kemudian muncul dalam perjanjian KMB dan sikap Australia terhadap Indonesia mengalami perubahan. Setelah Partai Liberal mengambil alih pemerintahan tahun 1950, terjadi perubahan pandangan Australia terhadap Indonesia. Pada tanggal 29 September 1950 di Den Haag, Spender mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki tuntutan yang sah terhadap Irian Barat. Pada tahun 1960, ketika Trikora dikumandangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Australia berada dipihak Belanda. Karena selain masih terpengaruh pandangan yang sama dengan Spender, pemerintah Australia juga mengetahui dominasi Partai Komunis di Indonesia. Australia tidak menginginkan komunisme masuk ke negerinya, dan mereka mengetahui adanya anggapan bahwa partai komunis Indonesia memiliki sifat ofensif. Ketegangan hubungan Indonesia – Australia yang bersumber dari masalah Irian Barat ini mereda, setelah masalah itu diselesaikan melalui PBB. Siboro lebih menekankan pada dinamika hubungan Indonesia-Australia, sehingga masalah Irian Barat tidak dibahas secara rinci.

Bramantyo (1990:4-9) mengungkapkan bahwa hubungan awal Australia – Indonesia terjadi setelah kemerdekaan Indonesia. Pada periode 1945 – 1949 ketika pemerintah Partai Buruh berkuasa hubungan kedua negara relatif baik, isu mengenai Irian Barat pada saat itu belum muncul ke permukaan. Secara historis ada tahapan perkembangan sikap Australia terhadap Indonesia. Pada awalnya

memihak Belanda kemudian timbul sikap ragu-ragu dan akhirnya memihak Indonesia (masa Revolusi kemerdekaan) bahkan kemudian mendukung Indonesia (ikut serta dalam Komisi Tiga Negara). Sikap Australia kemudian dirubah lagi setelah Konferensi Meja Bundar antara Indonesia – Belanda, karena adanya tuntutan Indonesia atas wilayah Irian Barat. Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada perubahan sikap Australia terhadap Indonesia selama Periode 1949-1962. Akan tetapi pembahasan mengenai akhir masalah Irian Barat tidak dibahas secara mendetail.

Dari uraian beberapa hasil penelitian diatas penyajian mengenai hubungan Indonesia-Australia dalam konflik pengembalian Irian Barat ternyata masih ada celah-celah yang belum diteliti. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji mengenai awal konflik Indonesia-Australia yang memfokuskan pada latar belakang hubungan Indonesia-Australia, latar belakang konflik Irian Barat (pada saat berlangsungnya perjanjian KMB), tahapan perkembangan konflik Indonesia-Australia dan penyelesaian akhir konflik Irian Barat.

Penulisan Skripsi ini membutuhkan pendekatan untuk menganalisis permasalahan terkait dengan Konflik Indonesia - Australia dalam Masalah Pengembalian Irian Barat. Menurut Kartodirjo (1992:4) Peristiwa sejarah sangat tergantung pada pendekatan, dari segi mana kita memandangnya, dimensi yang diperhatikan, unsur-unsur yang diungkapkan. Hasil pelukisan akan ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipakai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hubungan internasional. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori konflik dan teori kepentingan nasional.

Hubungan Internasional pada hakekatnya menunjukkan kepada sesuatu yang terjadi di dunia. Konsentrasi teori hubungan internasional berkaitan erat dengan perang atau damai, ataupun mengenai gejala-gejala internasional. Hubungan internasional ini berkaitan erat dengan hubungan luar negeri, perjanjian-perjanjian, perundingan atau diplomasi (Cilleland, 1981:1-4). Panikkar (dalam Roy, 1991:4) menyatakan bahwa diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Dalam kajian definisi tersebut ada beberapa hal yang tampak jelas mengenai konsep diplomasi;

pertama, unsur pokok hubungan diplomatik adalah negosiasi; kedua, negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara; ketiga, tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional. Pendekatan hubungan internasional digunakan untuk menganalisis upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam rangka mengembalikan wilayah Irian Barat kedalam NKRI sebagai salah satu kepentingan nasional Indonesia serta upaya diplomasi pemerintah Australia untuk menolak klaim Indonesia atas Irian Barat. Penolakan ini dilatar belakangi oleh keinginan Australia untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional melalui aspek keamanan dan pertahanan nasional.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik dan teori kepentingan nasional. Menurut Morgenthau (1991:164) Hakikat konflik internasional dapat diartikan sebagai ketegangan-ketegangan atau persengketaan-persengketaan. Konflik merupakan pertentangan-pertentangan yang taruhannya bukan hanya konsesi teritorial dan penyesuaian hukum dalam rangka pengakuan *status quo*, akan tetapi keberlangsungan *status quo* itu sendiri dan distribusi kekuasaan seluruhnya. Sengketa-sengketa tersebut yang merupakan gejala dari konflik kekuasaan dapat diformulasikan dalam istilah-istilah tuntutan, tuntutan balasan dan pengingkaran. Jika suatu sengketa menunjukkan ketegangan maka penyelesaian sengketa tersebut harus melalui negosiasi-negosiasi diplomatik, yang karena diperlukan harus berlangsung melalui kompromi memberi dan menerima. Lewis A. Coser (dalam Soekanto dan Lestari, 1998:23) beranggapan bahwa konflik merupakan suatu interaksi, sebagai bentuk perjuangan untuk mencapai nilai dan klaim terhadap statusquo, kekuatan-kekuatan dan sumber alam agar lawan nantinya dapat bersifat netral, mengakui atau melenyapkan lawan, interaksi antara hubungan negara satu dengan negara yang lain ini akan menyebabkan atau ditandai dengan adanya bentrokan-bentrokan di antara kepentingan, gagasan-gagasan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, program pribadi atau persoalan mendasar lainnya yang saling bertentangan. Teori konflik peneliti gunakan untuk melihat bagaimana upaya Indonesia dalam melakukan diplomasi untuk mengembalikan wilayah Irian Barat yang diduduki pihak lain yaitu Kerajaan Belanda serta upaya Indonesia untuk melakukan perundingan dan kompromi dengan Australia maupun

Amerika Serikat dan pihak yang terkait dalam konflik Irian Barat untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta dampak dari penyelesaian konflik Irian terhadap hubungan bilateral Indonesia – Australia.

Papp (1988:29) mengatakan bahwa dalam *national interest* terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas. Yusuf (1989:10) menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan visi yang diperjuangkan oleh suatu bangsa atau negara untuk dipergunakan dalam rangka ketertiban internasional. Konsep ini dirumuskan oleh para ahli teori politik dan dipatuhi oleh kepentingan golongan dan juga kepentingan para perumusannya. Kepentingan nasional erat kaitannya dengan masalah keamanan, integritas dan posisi negara melalui perimbangan kekuatan. Menurut Wibowo (2013) Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar dan faktor paling menentukan yang memadu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Konflik antara Indonesia –Australia tahun 1949-1962 erat kaitannya dengan persoalan Irian Barat. Persoalan-persoalan ini didasari atas kepentingan nasional masing-masing negara, baik Australia maupun Indonesia atas wilayah Irian Barat. Kepentingan Australia berupa kepentingan politik dan keamanan nasional. Sehingga implementasi teori kepentingan nasional dalam penelitian ini akan mengkaji hubungan bilateral Indonesia – Australia dalam masalah Irian Barat tahun 1949-1962 dari aspek kepentingan nasional masing-masing negara.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Sebelum melakukan penelitian, sangat penting bagi peneliti untuk memperhatikan metode penelitian yang akan digunakan. Karena metode yang sesuai dan tepat akan memberikan kelancaran bagi terlaksananya penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian sejarah, yang merupakan prosedur kerja sejarawan untuk menguji dan menganalisis sumber-sumber sejarah berupa rekaman dari peninggalan masa lampau secara logis, kritis, dan kronologis, yang kemudian disajikan menjadi kisah sejarah yang menarik. Dilihat dari sumber data yang digunakan, penelitian yang penulis lakukan ini termasuk dalam penelitian bibliografis atau penelitian kepustakaan. Prosedur metode penelitian sejarah terbagi menjadi empat langkah, yaitu : heuristik, kritik, interpretasi, historiografi (Notosusanto, 1971:22-23).

3.1 Heuristik

Langkah pertama dalam penelitian sejarah adalah heuristik, yakni kegiatan pengumpulan sumber-sumber informasi relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian penulis berusaha mencari berbagai sumber sejarah yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Langkah pertama penulis berusaha mengumpulkan berbagai sumber yang relevan terkait dengan Konflik Indonesia – Australia dalam masalah pengembalian Irian Barat Tahun 1949-1962. Sumber sejarah dilihat dari penyampaiannya dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber informasi yang diperoleh dari orang yang menyaksikan langsung atau tulisan orang yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa sejarah. Sumber sekunder adalah sumber informasi yang tidak terlibat langsung dalam suatu peristiwa atau kejadian. (Gottschalk, dalam Notosusanto, 1986:35).

Sumber primer dan sekunder yang diperoleh peneliti berupa sumber tertulis seperti : buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang diperoleh dari berbagai perpustakaan sebagai salah satu tempat peneliti melakukan kajian, yaitu

di Perpustakaan Pusat Universitas Jember, Perpustakaan Dinas Jember, dan Perpustakaan Bondowoso. Sumber primer yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti diantaranya, buku karangan Nasution, A.H yang berjudul Memenuhi Panggilan Tugas: Jilid 5 Kenangan Masa Orde Lama, buku karangan Agung, G.A.I.A berjudul Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat. Sumber sekunder diantaranya buku karangan Crithley, S. yaitu Hubungan Bilateral Australia-Indonesia, buku karangan George, M. Australia dan Revolusi Indonesia, buku karangan Adil, H. yang berjudul *Australia's Policy Towards Indonesia During Confrontation 1962-1966*, buku karangan Cholil, M. Yaitu Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat, buku karangan de Geus Masalah Irian Barat : Aspek Kebijakan Luar Negeri dan Kekuatan Militer buku Siboro, J. yaitu Sejarah Australia, buku karangan Lockwood, R. berjudul Armada Hitam, Buku karangan Jr. Bone yang berjudul *The Dynamics of the Western New Guinea (Irian Barat) Problem*, buku Chauvel, R. yang berjudul *Papua Nationalism: History, Ethnicity, and adaptation*, buku Notousanto, N. yaitu Sejarah Nasional Indonesia VI, buku Tobing, KML. yang berjudul perjuangan politik bangsa Indonesia Linggarjati, Renville dan KMB, buku Gie The L & Istanto S yaitu Pertumbuhan Pemerintahan Propinsi Irian Barat dan Kemungkinan-Kemungkinan Perkembangan Otonominya dihari kemudian Djilid 1, buku Soekanto, S. dan Lestari R yaitu Fungsionalisme dan Perkembangan Konflik dalam Perkembangan Sosiologi, buku Suryadinata, L yaitu Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto: Bab 6 Hubungan Indonesia dengan Australia dan Papua New Guinea, buku karangan Sinaga berjudul Masa Kuasa Belanda di Papua 1898-196, buku karangan Sunarti, L berjudul Persaudaraan Sepanjang Hayat : Mencari Jalan Penyelesaian Damai Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-1966.buku karangan Yamin, M berjudul Kedaulatan Indonesia atas Irian Barat, serta beberapa jurnal dan skripsi Sikap Australia Terhadap Indonesia dalam Masalah Irian Barat 1949-1962, Hubungan Bilateral Indonesia – Australia, Masalah Papua Dalam Konteks Hubungan Indonesia – Australia.

3.2 Kritik Sumber

Langkah kedua dalam penelitian sejarah setelah sumber berhasil ditemukan yakni melakukan kritik sebagai bagian dari pengujian sumber. Kritik adalah kegiatan menyelidiki apakah jejak-jejak itu sejati baik bentuk maupun isinya (Notosusanto, 1971:17). Kegiatan kritik sumber sejarah juga dilakukan penulis dengan cara kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern dilakukan untuk menilai keaslian sumber dalam penelitian ini. Kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan kritik ekstern adalah melihat secara teliti bentuk sampul, judul, tahun terbit, nama pengarang, dan latar belakang serta orientasi ideologinya apakah telah sesuai dan sejaman dengan masalah yang dibahas. Sedangkan kritik intern sebagai kelanjutan dari kritik ekstern yang dilakukan untuk memastikan apakah kesaksian yang diberikan suatu sumber memang dapat dipercaya. Dalam kritik intern kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis isi atau substansi yang terkandung di dalamnya. Kemudian membandingkan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain untuk memperoleh data yang valid berupa fakta sejarah. Adapun hal yang diperoleh setelah dilakukannya kritik intern yakni ditemukannya sumber yang dirasa peneliti valid untuk dikembangkan dan telah disebutkan satu persatu dalam langkah heuristik. Maka setelah dua langkah kritik dilaksanakan dihasilkanlah fakta sejarah yang dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta-fakta sejarah inilah yang nantinya akan diinterpretasi (Abdurrahman, 2007:17-19).

3.3 Interpretasi

Langkah ketiga dalam penelitian sejarah adalah melakukan interpretasi yaitu proses penafsiran terhadap fakta. Kegiatan ini berusaha untuk mengadakan penafsiran terhadap fakta sejarah dari hasil kritik sumber yang dipilih dirangkaikan secara kronologis, rasional, faktual, dan rasionalitas (Notosusanto, 1971:23). Jadi interpretasi adalah aktivitas menghubungkan fakta-fakta sejarah dengan berusaha berfikir se-obyektif mungkin, sehingga dapat mengungkapkan masyarakat masa lampau serta mampu menunjukkan kesesuaian satu dengan yang lainnya.

Peneliti menyusun fakta-fakta dari sumber sejarah yang sudah diperoleh secara kronologis, menghubungkan antara fakta satu dengan fakta lainnya sehingga memperoleh kesimpulan yang objektif dan rasional berdasarkan pada aspek pembahasan. Peneliti melakukan penafsiran terhadap konflik Indonesia–Australia dalam masalah pengembalian Irian Barat 1949-1962 dengan cara membandingkan dan menghubungkan makna dari fakta-fakta yang kemudian dirangkai dan saling dihubungkan secara kronologis sehingga menjadi satu kesatuan yang sistematis dan logis. Adapun sumber-sumber yang lolos sebagai tahapan kritik telah disesuaikan dengan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : rumusan masalah satu yaitu awal mula konflik Irian Barat diperoleh sumber, Armada Hitam, Hubungan Australia dengan Indonesia: Faktor Geografi, Politik, Strategi Keamanan, Australia dan Revolusi Indonesia, Armada Hitam, Sejarah Australia, Sikap Australia Terhadap Indonesia dalam Masalah Irian Barat 1949-1962, Hubungan Bilateral Indonesia – Australia, Sejarah Nasional Indonesia VI, perjuangan politik bangsa indonesia KMB, Negara Indonesia Timur Ke Negara Indonesia Serikat.; rumusan masalah kedua tentang jalannya konflik Irian Barat diperoleh dari sumber Faktor Geografi, Politik, Strategi Keamanan, Australia dan Revolusi Indonesia, Masalah Irian Barat :Aspek Kebijakan Luar Negeri dan Kekuatan Militer, Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat, Memenuhi Panggilan Tugas; Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama.; rumusan masalah yang ketiga tentang penyelesaian akhir konflik diperoleh dari sumber Hubungan Australia dengan Indonesia:Faktor Geografi, Politik, Strategi Keamanan, Australia dan Revolusi Indonesia, Masalah Irian Barat: Aspek Kebijakan Luar Negeri dan Kekuatan Militer, Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat, Masalah Irian Barat : Aspek Kebijakan Luar Negeri dan Kekuatan Militer, Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat, sejarah Australia, hubungan Australia dengan Indonesia: Faktor Geografi, Politik, Strategi Keamanan, sikap Australia terhadap Indonesia dalam masalah Irian Barat, Djalannya Revolusi Indonesia membebaskan Irian Barat.

3.4 Historiografi

Langkah terakhir dalam penulisan ini adalah Historiografi. Menurut Nugroho Notosusanto, historiografi adalah klimaks dari penelitian sejarah dan merupakan bagian dari metode sejarah yaitu menuliskan hasil interpretasi atas fakta-fakta sejarah yang telah disusun secara analitis, kronologis dan sistematis menjadi suatu kisah yang selaras. Dalam kegiatan historiografi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menyusun cerita sejarah dengan merangkai fakta-fakta sejarah dari hasil tiga langkah metode sebelumnya. Penulisan hasil penelitian sejarah hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejarah dari awal hingga akhir (Abdurrahman, 2007:76). Peneliti harus memperhatikan syarat umum didalam pemaparan sejarah, yaitu:

- 1) Memiliki kemampuan mengungkapkan dengan bahasa yang baik, dalam hal ini penelitian harus memerhatikan pedoman penulisan bahasa Indonesia yang baik, peneliti harus memilih kata atau gaya bahasa yang tepat dan jelas
- 2) Terpenuhi kesatuan sejarah, dalam hal ini penulisan harus ditempatkan sesuai dengan perjalanan sejarah
- 3) Menjelaskan apa yang ditemukan oleh peneliti dengan menyajikan bukti-buktinya dan membuat garis-garis umum yang akan diikuti secara jelas oleh pemikiran pembaca, dalam hal ini peneliti akan membuat pola penulisan atau sistematika penyusunan dan pembahasan
- 4) Keseluruhan pemaparan sejarah haruslah argumentatif, dalam hal ini peneliti akan mengarahkan ide-idenya dalam merekonstruksi masa lampau itu didasarkan atas bukti-bukti yang terseleksi, bukti yang cukup lengkap, dan detail fakta yang cukup akurat (Hasan Usman, dalam abdurrahman, 2007:76-77).

Penulisan dan pemaparan yang dilaksanakan peneliti mengenai hubungan Australia – Indonesia dalam konflik pengembalian Irian Barat tahun 1949-1962 menampilkan kejelasan, keteguhan, serta kerapian ekspresi penulisan sehingga